

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Sartika R	Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Desa Rappoala Kabupaten Gowa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana bentuk komunikasi pemerintah dengan masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Desa Rappoala kabupaten Gowa?</li><li>2. Apakah faktor penghambat dalam komunikasi pemerintah dengan masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Desa Rappoala Kabupaten Gowa?</li></ol>	Dalam penanganan Covid-19 pemerintah daerah dan masyarakat saling bekerjasama dalam memutus mata rantai Covid-19 dengan cara menjalankan protokol kesehatan. Komunikasi pemerintah di Desa Rappoala dapat dikatakan cukup efektif yang melakukan pendekatan melalui beberapa kelompok, dan pendekatan dengan emosional yang dapat menumbuhkan rasa kepedulian. Dan juga melihat respon positif dari masyarakat yang mendukung dan menjalankan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai contohnya, masyarakat di desa Rappoala kabupaten Gowa

				<p>sebagian besar bersedia menjalankan protokol kesehatan selain itu masyarakat juga sangat antusias dan merespon dengan baik dengan adanya pembagian masker, pembagian handsanitizer, dan disediakan tempat cuci tangan. Adapun hambatan dalam komunikasi pemerintah dengan masyarakat di Desa Rappoala Kabupaten Gowa, adalah masih ada beberapa respon masyarakat yang kurang partisipasi dalam menjalankan protokol kesehatan, dengan berbagai alasan sehingga tidak menjalankannya meskipun disampaikan kepada mereka apa akibat dari tidak dijalankannya protokol kesehatan tersebut</p>
--	--	--	--	--

2.	Ikhsanul Amri	Koordinasi Pemerintah dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar	Bagaimana Koordinasi Pemerintah dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar.	<p>Koordinasi Pemerintah Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar terdapat 5 indikator sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesepakatan, yakni dalam percepatan penanganan covid-19 semua instansi atau lembaga terkait mengacu pada arahan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.</li> <li>2. Kesempatan, yakni semua instansi atau lembaga terkait menggunakan waktu dan kesempatan sebaik mungkin, melakukan rapat virtual, standby 24 jam untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar.</li> <li>3. Kegiatan, yakni melakukan kegiatan dari kebijakan pusat terkait tugas dan tanggungjawab Satuan Gugus Tugas Covid-19 seperti mengurai</li> </ol>
----	---------------	---	--	--

				<p>kerumunan, penyemprotan, membagikan masker.</p> <p>4. Saling tukar informasi, dalam hal ini semua instansi atau lembaga terkait saling berbagi informasi terkait perkembangan kasus covid-19, baik melalui website maupun group whatsapp yang terdapat semua SKPD yang terlibat dalam koordinasi percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar.</p> <p>5. Hormati wewenang, dalam hal ini instansi atau lembaga saling menghormati wewenang masing-masing. Setiap instansi harus menindaklanjuti sesuai ranahnya, tergantung dari bidang apa yang harus menangani hal tersebut</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel hasil penelitian terdahulu diatas, persamaan dan perbedaan daengan penelitian penulis sebagai berikut :

1. Persamaan penelitian terdahulu Nomor 1 dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai peran pemerintah dalam penanggulangan

dan pencegahan Covid-19. Perbedaan antara penelitian terdahulu Nomor 1 dengan penelitian penulis adalah pada penelitian terdahulu menjelaskan tentang bentuk komunikasi pemerintah dengan Masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Desa Rappoala Kabupaten Gowa dengan menggunakan pendekatan berbentuk beberapa kelompok dan pendekatan emosional yang dapat menumbuhkan rasa kepedulian serta membahas mengenai faktor penghambat dalam komunikasi pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Desa Rappoala Kabupaten Gowa. Sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai peran Pemerintah Daerah Banyumas dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 serta menjelaskan faktor penghambat pemerintah daerah Banyumas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19

2. Persamaan penelitian terdahulu Nomor 2 dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai peran pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Perbedaan antara penelitian terdahulu nomor 2 dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. Sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai peran dari Pemerintah Daerah Banyumas dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dan juga membahas mengenai faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Banyumas dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Negara Kesejahteraan**

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara universal dan komprehensif kepada warganya.<sup>6</sup> Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.<sup>7</sup> Dan kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (state of mind). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan factor-factor ekonomi lainnya.

Negara bagian barat seperti di Negara Inggris, konsep Welfare state dipahami sebagai alternative terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk member bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan system dalam the Poor Law, Negara

---

<sup>6</sup> Oman Sukmana. 2016. Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), Jurnal Sospol, Vol 2 No.1, hlm. 103-122

<sup>7</sup> MD, Moh. Mahfud, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Reneka Cipta, hlm.64

kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan system perlindungan social yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan kewajiban Negara (state obligation), dipihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan system sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (well-being) warga Negara secara adil dan berkelanjutan.<sup>8</sup>

Menurut Prof. Kranenburg, pencetus Teori Negara Kesejahteraan menyatakan bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Sementara Spicker mengatakan Negara Kesejahteraan adalah sebuah sistem kesejahteraan nasional yang memberi peran lebih besar kepada negara untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Banyak lagi akademisi lainnya mengurai definisi Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) yang muaranya adalah kehendak politik negara untuk memanfaatkan sumberdaya demi kesejahteraan rakyat.<sup>9</sup>

Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Menurut Esping Anderson (1990), bahwa Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm.65

<sup>9</sup> Ruray, Syaiful Bahri, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 27

dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan.<sup>10</sup>

Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.<sup>11</sup>

Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh Negara.<sup>12</sup>

## 2. Teori Peranan

Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” Teori peran (role theory) Daniel Katz & Robert L.Kahn (1966), dalam Bauer, (2003: 54) mendefinisikan “peran”

---

<sup>10</sup> Husodo, Siswo Yudo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Cetakan I, hlm. 8

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 9

<sup>12</sup> Ibid.,



atau “role” sebagai “batas-batas dan serangkaian harapan yang diterapkan pada peran pemegang jabatan dari posisi tertentu, yang ditentukan oleh pemegang peran dan pengirim peran di dalam dan di luar batas-batas organisasi”. Selain itu, Robbins (2001: 227) mendefinisikan peran sebagai “seperangkat pola perilaku yang diharapkan dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial”.<sup>13</sup>

Peran merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) role perception: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut; dan (2) role expectation: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.<sup>14</sup>

Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan ada lima aspek penting dari peran, yaitu:

- a) Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.

---

<sup>13</sup> Syahri, M. Alfi, 2018, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah: *PERAN DAN WEWENANG MAJELIS TUHA PEUT DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN PARTAI ACEH*, Vol. 3 No.1-22, hlm.7

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 8

- b) Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- c) Peran itu sulit dikendalikan – (role clarity dan role ambiguity)
- d) Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
- e) Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.<sup>15</sup>

Sedangkan Biddle & Thomas (1966), mengklasifikasi teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- 1 Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- 2 Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- 3 Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- 4 Kaitan diantara orang dan perilaku.<sup>16</sup>

### **3. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah (PEMDA)**

- a) Pengertian Pemerintah Daerah

Secara harfiah istilah pemerintahan atau dalam bahasa Inggris adalah pedanan dari kata government. Jadi, Pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.<sup>17</sup> Sedangkan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

---

<sup>15</sup> Ibid.,

<sup>16</sup> Ibid.,

<sup>17</sup> Nawawi Zaidan, 2013, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.18

dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>18</sup>.

b) Asas-asas Pemerintah Daerah

1 Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.

2 Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya. Jadi, asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.

3 Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

ditugaskan kepada pemerintahan daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.<sup>19</sup>

c) Tujuan Pemerintah Daerah

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.<sup>20</sup>

#### 4. Pengertian Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan yang identik dengan perilaku.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Kansil, C.S.T. dan Christine Kansil, 2008, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 142

<sup>20</sup> Pangerang Moenta dan Pradana Anugrah, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Makassar: PT Raja Grafindo Persada, hlm.23

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dalam mengambil langkah-langkah pencegahan, haruslah didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan atau penelitian epidemiologi.<sup>22</sup>

Upaya preventif/pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Prevensi diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.

## **5. Pengertian Penanggulangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanggulangi berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi, sedangkan penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.<sup>23</sup>

## **6. Tinjauan Umum Covid-19**

### **a) Pengertian Covid-19**

Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu alphacoronavirus 229E, alphacoronavirus NL63, betacoronavirus

<sup>22</sup> Noor, Nur Nasry. 2008. Epidemiologi. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 995

OC43, betacoronavirus HKU1, Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV), dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).<sup>24</sup>

Virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid 19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.<sup>25</sup>

d) Penularan Virus Covid-19

Virus corona merupakan zoonosis, sehingga terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia. Pada COVID-19 belum diketahui dengan pasti proses penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan COVID-19 juga merupakan zoonosis. Perkembangan data selanjutnya menunjukkan penularan antar manusia (human to human), yaitu diprediksi melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan

---

<sup>24</sup> Susilo Adityo, dkk, 2020. Jurnal Penyakit Dalam: *Coronavirus Disease 2019 Tinjauan Literatur Terkini*, Vol. 7 No.1 hlm. 46

<sup>25</sup> Timah Stefanus, 2021, Hubungan Penyuluhan Kesehatan dengan Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado, Vol.3 No.1 hlm. 3

dalam droplet. Hal ini sesuai dengan kejadian penularan kepada petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19, disertai bukti lain penularan di luar Cina dari seorang yang datang dari Kota Shanghai, Cina ke Jerman dan diiringi penemuan hasil positif pada orang yang ditemui dalam kantor. Pada laporan kasus ini bahkan dikatakan penularan terjadi pada saat kasus indeks belum mengalami gejala (asimtomatik) atau masih dalam masa inkubasi. Laporan lain mendukung penularan antar manusia adalah laporan 9 kasus penularan langsung antar manusia di luar Cina dari kasus index ke orang kontak erat yang tidak memiliki riwayat perjalanan manapun.<sup>26</sup>

Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan kontak dengan virus kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Suatu analisis mencoba mengukur laju penularan berdasarkan masa inkubasi, gejala dan durasi antara gejala dengan pasien yang diisolasi. Analisis tersebut mendapatkan hasil penularan dari 1 pasien ke sekitar 3 orang di sekitarnya, tetapi kemungkinan penularan di masa inkubasi menyebabkan masa kontak pasien ke orang sekitar lebih lama sehingga risiko jumlah kontak tertular dari 1 pasien mungkin dapat lebih besar.<sup>27</sup>

#### e) Pencegahan Covid-19

Pencegahan utama adalah membatasi mobilisasi orang yang berisiko hingga masa inkubasi. Pencegahan lain adalah meningkatkan daya tahan tubuh melalui asupan makanan sehat, memperbanyak cuci

---

<sup>26</sup> Handayani Diah, dkk, 2020, Jurnal Respirologi Indonesia: *Penyakit Virus Corona 2019*, Vol. 4 No. 2, hlm.112

<sup>27</sup> Ibid.,

tangan, menggunakan masker bila berada di daerah berisiko atau padat, melakukan olah raga, istirahat cukup serta makan makanan yang dimasak hingga matang dan bila sakit segera berobat ke RS rujukan untuk dievaluasi.<sup>28</sup>

Saat ini tidak ada vaksinasi untuk pencegahan primer. Pencegahan sekunder adalah segera menghentikan proses pertumbuhan virus, sehingga pasien tidak lagi menjadi sumber infeksi. Upaya pencegahan yang penting termasuk berhenti merokok untuk mencegah kelainan parenkim paru.<sup>29</sup>

Pencegahan pada petugas kesehatan juga harus dilakukan dengan cara memperhatikan penempatan pasien di ruang rawat atau ruang intensif isolasi. Pengendalian infeksi di tempat layanan kesehatan pasien terduga di ruang instalasi gawat darurat (IGD) isolasi serta mengatur alur pasien masuk dan keluar. Pencegahan terhadap petugas kesehatan dimulai dari pintu pertama pasien termasuk triase. Pada pasien yang mungkin mengalami infeksi COVID-19 petugas kesehatan perlu menggunakan APD standar untuk penyakit menular. Kewaspadaan standar dilakukan rutin, menggunakan APD termasuk masker untuk tenaga medis (N95), proteksi mata, sarung tangan dan gaun panjang (gown).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 126

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.



## 7. Pengertian Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem social. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>31</sup>

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapat mereka tentang pengertian masyarakat secara luas yaitu:

- a) M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu.
- b) J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.
- c) S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur.
- d) Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system

---

<sup>31</sup> Prof. Dr. Koentjaraningrat. 2013. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.

pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.

- e) Karl Marx menyatakan suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.
- f) Max Weber menyatakan suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.
- g) Selo Soemardjan menyatakan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.<sup>32</sup>

Jadi, masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama. Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu:

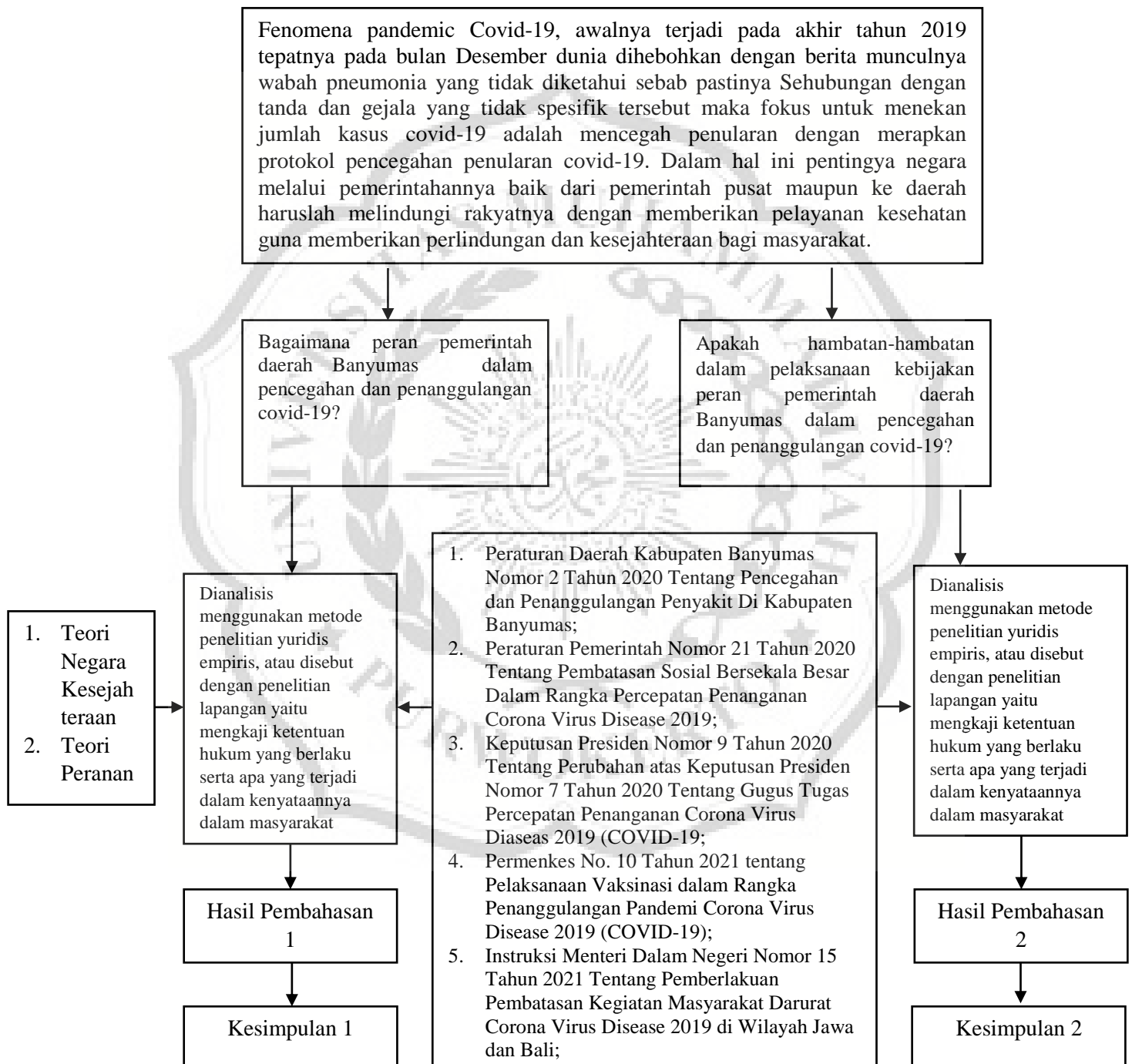
1. Adaptasi dan membentuk organisasi tingkah laku dari para anggotanya.
2. Timbulnya secara lambat, perasaan kelompok atau *lesprit de corps*. Proses itu biasanya bekerja tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana *trial and error*. Agar tidak simpang siur dalam menggunakan istilah, kelompok/group di sini adalah setiap himpunan manusia sosial yang mengadakan relasi sosial antara satu dan lainnya. sebagai satu resiprositas. Kelompok tersebut belum

---

<sup>32</sup> Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Pengantar Antropologi*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm.137.

terorganisasikan secara sadar. Contohnya adalah crowd, class, primary dan secondary group dan organisasi besar.<sup>33</sup>

### C. Kerangka Pikiran



<sup>33</sup> Ibid., hlm.137-138